



KABUPATEN
Sragen



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023



Jalan Raya Sukowati No. 599
Sragen- 57212



(0271) 891078



dkksragenkab@sragen.go.id



<http://www.sragen.go.id>





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	1
3. Sumber Daya Manusia.....	4
4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi	13
5. Landasan Hukum	13
BAB II RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	16
1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
2. Rencana Aksi Tahun 2023	17
BAB III PENUTUP	34



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	6
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	7
Tabel 2. 3 Jumlah Dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sragen Tahun 2020 – 2021	8
Tabel 2. 4 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Sragen Tahun 2017 – 2021	9
Tabel 2. 5 Jumlah dan Rasio Posyandu Menurut Wilayah Puskesmas Di Kabupaten Sragen Tahun 2017 – 2021	10
Tabel 2. 6 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021	11
Tabel 2. 7 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan Tahun 2021	11
Tabel 2. 8 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021	12
Tabel 3. 1 Tabel Rencana Aksi Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


Kegiatan Program Kesehatan pada RPJMD Tahun 2021-2026 berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Selain RPJMD, kegiatan Program Kesehatan di Kabupaten Sragen juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang memuat indikator program dan kegiatan Tahun 2021-2026.


Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, dalam mewujudkan misi Bupati, mengacu pada misi ke-1 yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja utama yaitu usia harapan hidup.

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 untuk semua rencana program dan kegiatan di masing-masing seksi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen serta menjadi acuan didalam pelaksanaan program Kesehatan selama 1 (satu) tahun dalam mendukung usia harapan hidup dan cakupan Kesehatan masyarakat di kabupaten Sragen.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen No. 6 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- 
1. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
 4. Pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 5. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 6. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga serta peningkatan mutu dan perijinan pelayanan kesehatan;
 7. Penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta pengembangan sistem informasi kesehatan;
 8. Pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan;
 9. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
 10. Pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;

- 
11. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

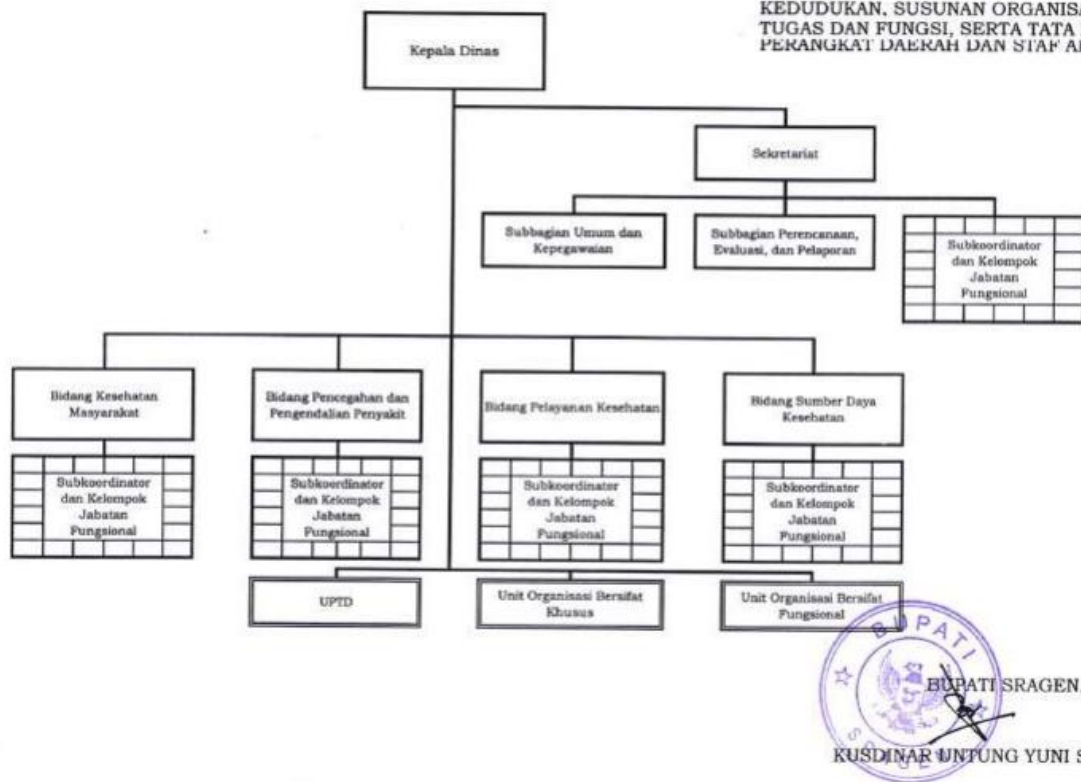
Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Surveilans dan imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN VIA
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI




Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Sragen

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penguatan SDM, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi, pedoman umum, pedoman tingkat propinsi dan pedoman tingkat Kabupaten/ Kota. Pedoman tersebut telah dilengkapi dengan buku manual dan aplikasi. Kebutuhan SDM Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan mengacu pada Metode Analisis Beban Kerja (ABK) Kesehatan (Permenkes Nomor 33 Tahun 2015/Permen PANRB Nomor 26 tahun 2011/Permendagri Nomor 12 tahun 2008) dan Metode Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 (untuk RS Umum), Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 (untuk RS Khusus), Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2011).

Beberapa metode dapat digunakan dalam menentukan jumlah kebutuhan SDM Kesehatan, setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Metode yang akan digunakan adalah metode



berdasarkan standar tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan metode Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015.

Sumber Daya Manusia Kesehatan juga merupakan tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga non kesehatan profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan.

1. Berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian jumlah SDM Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Pegawai PPPK
- d. Tenaga Harian Lepas (THL)

2. Berdasarkan rumpun

Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Sragen bekerja baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS di sektor pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Hal tersebut dapat dilihat Tabel 2.1 yang menggambarkan data Sumber Daya Manusia Kesehatan per Rumpun dengan value jenis kelamin yang ada di Kabupaten Sragen:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 Berdasar Rumpun

NO	RUMPUN SDM	PNS	
		L	P
1	DOKTER	33	66
2	DOKTER GIGI	9	23
3	DOKTER SPESIALIS	33	22
4	DOKTER GIGI SPESIALIS	0	0
5	DOKTER SUB PESIALIS/KOPENTENSI TAMBAHAN	0	0
6	PSIKOLOGIS KLINIS	0	0
7	KEPERAWATAN	175	463
8	KEBIDANAN	0	588
9	APOTEKER	22	102
10	KESEHATAN MASYARAKAT	18	30
11	KESEHATAN LINGKUNGAN	10	25
12	GIZI	6	42
13	KETERAPIAN FISIK	8	16
14	KETEKNISIAN MEDIS	3	2
15	TEKNIK BIOMEDIKA	0	0
16	KESEHATAN TRADISIONAL	0	0
17	NAKES LAINNYA	25	112
18	ASISTEN NAKES	0	0
19	TENAGA PENUNJANG	107	115
	JUMLAH TOTAL (2.055)	449	1606

Berdasarkan tabel 2.1 diatas diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Sragen memiliki total 2.055 orang SDM Kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah dan swasta, dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 449 orang dan PNS perempuan sebanyak 1.606 orang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2022 adalah 929.810 jiwa. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) tahun 2011-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2021 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 42 per 100.000 penduduk, dokter umum 77 per 100.000 penduduk, dokter gigi 12

per 100.000 penduduk, perawat 275 per 100.000 penduduk, bidan 117 per 100.000 penduduk, apoteker 41 per 100.000 penduduk, tenaga teknik kefarmasian 61 per 100.000 penduduk, SKM 13 per penduduk, sanitarian 7 per 100.000 penduduk, gizi 11 per 100.000 penduduk, keterampilan fisik 11 per 100.000 penduduk, dan keteknisan medis 30 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sudah memenuhi target RTPK yaitu 42 dokter spesialis, 77 dokter umum, dokter gigi 12 dokter gigi, perawat 275, dan bidan 117 per 100.000 penduduk.

3. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan eselon jumlah SDM Kesehatan sebanyak 44 orang, yang menduduki eselon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 Berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	
2	PASCASARJANA (S2)	122
3	SARJANA (S1)	469
4	DIPLOMA EMPAT (D4)	139
5	DIPLOMA TIGA (D3)	1166
6	SLTA / SMEA / MA	159
JUMLAH		2.055

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis diukur dengan indikator rasio dokter dan dokter gigi per jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dan dokter gigi dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter dan dokter gigi per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2. 3 Jumlah Dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sragen Tahun 2020 – 2021

NO	URAIAN	2020	2021
		1	Jumlah penduduk
2	Jumlah dokter umum	209	257
3	Rasio dokter umum	1 : 4.272	1 : 3.801
4	Jumlah dokter gigi	27	43
5	Rasio dokter gigi	1 : 33.070	1 : 22.719
6	Jumlah dokter spesialis	119	129
7	Rasio dokter spesialis	1 : 7.503	1 : 7.573

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio dokter umum 1 banding 3.801 hal ini menunjukkan satu orang dokter umum melayani 3.801 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa jumlah tenaga medis di kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sragen sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut;

- a. Puskesmas rawat jalan : 4
- b. Puskesmas rawat inap : 21
- c. Puskesmas Pembantu : 53
- d. Poskesdes : 191

Rasio sumber daya kesehatan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana

mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah : 1) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu: ibu hamil, melahirkan dan nifas; 2) membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS); 3) meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera; dan 4) berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio Posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Rasio Posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ ditingkatkan. Rasio Posyandu dan Balita dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2. 4 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Sragen Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	1.591	1.594	1.585	1.597	1.597
2	Jumlah balita	54.812	55.817	55.084	52.906	52.906
3	Rasio	1:34	1:35	1:35	1:33	1:33
	Rasio Ideal	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Sragen Tahun 2021

Rasio posyandu terhadap jumlah balita idealnya adalah 1 : 50, di Kabupaten Sragen rata-rata rasionya 1 : 34, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu termasuk memadai dalam melayani balita yang ada.

Tabel 2. 5 Jumlah dan Rasio Posyandu Menurut Wilayah Puskesmas Di Kabupaten Sragen Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kalijambe	101	3.401	33,67
2	Plupuh	96	2.948	30,71
3	Masaran	140	4.928	60,84
4	Kedawung	109	3.747	13,79
5	Sambirejo	62	2.512	40,52
6	Gondang	75	2.868	38,24
7	Sambungmacan	73	2.386	32,68
8	Ngrampal	68	2.560	37,65
9	Karangmalang	90	3.562	39,58
10	Sragen	120	3.669	30,58
11	Sidoharjo	87	2.233	25,67
12	Tanon	89	2.825	31,74
13	Gemolong	98	2.884	29,43
14	Miri	55	1.852	33,67
15	Sumberlawang	70	1.149	34,17
16	Mondokan	55	1.068	40,64
17	Sukodono	57	1.725	30,26
18	Gesi	46	1.265	27,50
19	Tangen	52	1.607	30,90
20	Jenar	54	1.307	24,20
		1.597	52.906	32,94

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Sragen Tahun 2021

Dari Tabel 2.4 Dan 2.5, jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Sragen telah mampu mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2) Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada Tabel 2.6 - 2.7.

Tabel 2. 6 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	TAHUN	
		2020	2021
1	Jumlah Penduduk	892.916	976.951
2	Jumlah Puskesmas	25	25
	a. Puskesmas Rawat Inap	21	21
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	4	4
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:35.716	1 : 39.078
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	53	53
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	1:16.847	1 : 18.433
6	Jumlah Poskesdes	171	171
7	Rasio Poskesdes per satuan penduduk	1:5.221	1: 5.713

Sumber: Profil Sistem Informasi SDM Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2021

Tabel 2. 7 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Puskesmas Pembantu		PKD	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1	Kalijambe	49.323	1	49.323	4		10	
2	Plupuh	43.803	2	43.803	2		15	
3	Masaran	75.347	2	75.347	3		13	
4	Kedawung	60.296	2	60.296	4		10	
5	Sambirejo	36.070	1	36.070	3		8	
6	Gondang	42.456	1	42.456	1		9	
7	Sambungmancan	45.778	2	45.778	2		8	
8	Ngrampal	37.899	1	37.899	3		8	
9	Karangmalaning	67.037	1	67.037	1		10	
10	Sragen	69.127	1	69.127			8	
11	Sidoarjo	51.694	1	51.694	3		12	
12	Tanon	51.862	2	51.862	3		13	
13	Gemolong	46.955	1	46.955	2		12	
14	Miri	32.499	1	32.499	5		10	
15	Sumberlawaning	44.552	1	44.552	4		7	
16	Mondokan	34.143	1	34.143	2		9	
17	Sukodono	30.091	1	30.091	3		9	

18	Gesi	20.395	1	20.395	2	7
19	Tangen	26.348	1	26.348	1	6
20	Jenar	27.241	1	27.241	3	7

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Sragen Tahun 2021

Dari data pada Tabel 2.7, bahwa sebaran Puskesmas telah ada di setiap Kecamatan dan dalam kondisi tertentu bisa lebih dari 1 (satu) Puskesmas dalam 1 (satu) kecamatan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.

3) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada Tabel 2.8

Tabel 2. 8 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	885.122	890.519	892.916
2	Jumlah Rumah Sakit	11	11	11
	a. RS Pemerintah	2	2	2
	b. RS Swasta	9	9	9
5	Rasio Rumah Sakit	1:80.465	1:80.956	1:81.174
7	Rasio Ideal			

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Sragen Tahun 2021

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2021 adalah 1 : 81.174 artinya satu rumah sakit melayani 81.174 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Sragen dengan penduduk sebesar 892.916 jiwa sudah terpenuhi untuk pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Di sisi lain sebaran rumah sakit yang ada masih terbatas di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sragen dan Kecamatan Gemolong.

4) Tempat tidur Rumah Sakit dan Puskesmas

Tempat tidur rumah sakit dan puskesmas menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien untuk dilakukan perawatan dan penanganan lebih lanjut. Jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit dan puskesmas sebanyak 1.521 buah dengan rincian sebagai berikut :

a. Puskesmas Rawat Inap	: 210 tempat tidur
b. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	: 315 tempat tidur
c. RSUD Mardi Lestari	: 98 tempat tidur
d. RSI Amal Sehat	: 105 tempat tidur
e. RSUI Yakshi	: 62 tempat tidur
f. RS Sarila Husada	: 122 tempat tidur
g. RSUD Assalam	: 101 tempat tidur
h. RSIA Restu Ibu	: 52 tempat tidur
i. RSUD PKU Muhammadiyah	: 93 tempat tidur
j. RSUD dr. Soeratno Gemolong	: 168 tempat tidur
k. RSUD Saras Ibnu Sina	: 83 tempat tidur
l. RSUD Rizky Amalia	: 51 tempat tidur
m. RSUD Sukowati Tangen	: 61 tempat tidur

4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi


Untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi maka perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja.

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja adalah:

- 1) Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja;
- 2) Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam satu tahun.

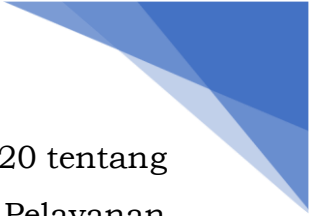
5. Landasan Hukum

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan



Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

BAB II
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Penunjang/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,02
2.	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	80

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	175.590.032.086	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	87.229.023.572	APBD, DAK, DBHCHT
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.697.149.000	APBD, DAK

4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	49.896.750	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.242.328.350	APBD, DAK

Tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2023 yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup dan target 75,96%. Sedangkan sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau, dengan indikator kinerja 80%. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen didukung oleh 5 Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kelima program tersebut bersumber dana dari APBD, DAK, DID, DBHCHT dan BLUD.

2. Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Tahun 2023, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Tabel Rencana Aksi Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRI WULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR)		76,02	266.808.429.758	63.411.128.358	101.174.936.372	60.728.233.562	41.494.131.466	Kepala Dinas Kesehatan
2	Sasaran										
	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target 100% dibagi Jumlah semua indikator SPM	%	80%	266.808.429.758	63.411.128.358	101.174.936.372	60.728.233.562	41.494.131.466	Kepala Dinas Kesehatan
3	Program										
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Layanan Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan dikali 100%	%	100%	87.229.023.572	23.885.913.741	36.783.282.895	22.325.037.441	4.234.789.495	Kepala Dinas Kesehatan
4	Kegiatan										
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kerja terdiri dari : 1. Obat dan Vaksin 2. Alat Kesehatan 3. Bahan Medis Habis Pakai 4. Bangunan/Fasilitas Fisik	kategori	4	31.420.638.000	5.330.585.000	14.421.828.600	11.665.674.400	2.550.000	Kabid Yankes, Kabid SDK

Sub Kegiatan											
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang direncanakan (X-1) dan atau dibangun disuatu wilayah dalam satu tahun anggaran : (1) Pagar, (2) Ruang Jenazah, (3) Paving, (4) Pos Satpam, dan prasarana lainnya	Unit	1	5.200.000.000	5.200.000.000	0	0	0	0	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah puskesmas yang direncanakan (X-1) dan/atau dibangun/dikembangkan/direhabilitasi di suatu wilayah dalam satu tahun anggaran.	unit	1	0	0	0	0	0	0	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah akumulasi luas tanah yang akan dibeli	unit	0	0	0	0	0	0	0	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan yang memenuhi persyaratan ketersediaan kelas layanan selain Alat Kesehatan Habis Pakai yang dimiliki dibagi jumlah Alat Kesehatan sesuai dengan standar kelas layanan dikali 100%	unit	910	7.821.423.000	98.465.000	7.722.958.000	0	0	0	Subkor Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Jenis Obat yang memiliki ketersediaan sesuaistandar dibagi jumlah Jenis Obat sesuaistandar dikali 100%	paket	1	18.149.215.000	27.595.000	6.698.870.600	11.420.199.400	2.550.000	0	Subkor Kefarmasian

	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan Habis Pakai yang dilakukan pemeliharaan dibagi jumlah seluruh Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan yang dimiliki dikali 100%	unit	321	250.000.000	4.525.000	245.475.000	0	0	Subkor Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah Unit Pelayanan yang memiliki Standar Pelayanan disuatu wilayah tertentu dibagi Seluruh Unit Pelayanan di suatu wilayah tertentu dikali 100%	persen	100%	55.753.385.572	18.500.328.741	22.361.454.295	10.659.363.041	4.232.239.495	Kabid Yankes, Kabid P2P, kabid Kesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibagi dengan jumlah ibu hamil yang ada diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	13.451	3.759.366.500	1.127.192.050	2.476.191.150	154.988.000	995.300	Subkoordin ator Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin mandapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin ng berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu dikalli 100%	orang	12.551	639.639.000	288.336.000	304.012.000	28.800.000	18.491.000	Subkoordin ator Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi baru lahir yang ada diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	12.649	2.131.088.508	210.141.450	1.728.961.508	115.191.000	76.794.550	Subkoordin ator Kesehatan Keluarga dan Gizi

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah balita usia 0-59 Bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah semua balita usia 0 Hari-59 Bulan yang memiliki buku KIA di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	orang	50.791	2.662.250.000	2.000.246.500	509.278.500	148.975.000	3.750.000	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s.d 9) dalam sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar sekolah yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam satu tahun ajaran di wilayah kerja dibagi Jumlah Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s.d 9) dalam sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar sekolah dalam kurun waktu satu tahun ajaran dikali 100%	orang	119.016	1.286.309.825	428.291.000	793.143.775	63.374.800	1500250	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah orang usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan terpadu (PANDU) di Puskesmas dibagi jumlah orang usia ≥ 15 tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	605.857	6.077.670.350	1.744.595.000	2.188.363.150	1.466.052.700	678.659.500	Subkoordinator P2PTM dan Keswa

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan dikalikan 100%		130	717.014.992	0	637709892	79304950	150	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita Hipertensi \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi dalam 1 tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	275.439	189.628.900	14315900	175313000	0	0	Subkoordinator P2PTM dan Keswa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita DM usia 15 tahun tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita DM usia 15 tahun dalam 1 tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	23.784	3.303.013.956	811670000	2477093956	14250000	0	Subkoordinator P2PTM dan Keswa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat dalam 1 tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	2.459	126.229.250	11851750	106527500	6150000	1700000	Subkoordinator P2PTM dan Keswa

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dibagi jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	10.584	258.075.069	85010800	165114269	6250000	0	Subkoordin ator P2PM
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dalam 1 tahun diwilayah kerja Puskesmas dikali 100%	orang	17.091	713.342.300	376149800	313912500	15780000	7500000	Subkoordin ator P2PM
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Krisis Kesehatan dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ditangani dibagi Jumlah Krisis Kesehatan dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) dikali 100%	Dokumen	11	16.032.400	16.032.400	0	0	0	Subkoordin ator Surveilans dan Imunisasi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dukungan Kesehatan Lapangan yang dipenuhi Sesuai Standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Permintaan Dukungan Kesehatan Lapangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	Dokumen	126	99.793.000	493000	0	0	99300000	Subkoordin ator Surveilans dan Imunisasi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	570.617.500	350640500	219977000	0	0	Subkoordin ator Kesehatan Keluarga dan Gizi

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	61.150.900	34596900	18114000	0	0	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	18	264.565.600	36905550	87238750	88532300	51889000	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	20	11.516.000	2541500	5961500	3013000	0	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	8	370.289.000	46429000	255715000	39735000	28410000	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kesehatan	Dokumen	0	102.100.500	45007000	39993500	17100000	0	Subkoordinator P2PTM dan Keswa
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	714.489.350	232595000	419338350	61671750	884250	Subkoordinator P2PTM dan Keswa
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	23	26.198.966.700	8973627000	7363085500	7360449500	2501804700	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	3,093	9.289.100	7801600	0	1487500	0	Subkoordinator P2PTM dan Keswa
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	36	87.862.000	48286000	39576000	0	0	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	60	4.388.514.172	1339395291	1684706295	682206291	682206295	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	12	340.020.000	87145000	84625000	84625000	83625000	Kepala UPTD IFK
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Puskesmas	25	390.986.000	138395950	185090050	33750000	33750000	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	263.564.000	68793700	65929250	70262250	58579500	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Jumlah data/modul/aplikasi yang terhubung dengan sistem informasi Dinas Kesehatan dibagi Jumlah data/modul/aplikasi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk diintegrasikan dikali 100%	%	70%	55.000.000						Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	55.000.000	55.000.000	0	0	0		Kasubbag PEP
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	(Jumlah persentase tenaga kesehatan yang kompeten dan persentase tenaga penunjang yang kompeten) dibagi 2	%	100%	1.697.149.000	227701750	1118461450	350985800			Kabid SDK
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai Standar Di Suatu Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu dibagi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Suatu Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu dibagi 100%	%	80,66%	1.697.149.000	227701750	1118461450	350985800			Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	659	1.697.149.000	227701750	1118461450	350985800			Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Jumlah Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah Sarana Kefarmasian yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan dikali 100%, Sarana Kefarmasian yang dimaksud terdiri atas: (1) Apotek (2) Toko Obat berizin (3) Industri Rumah Tangga Pangan (4) Usaha Mikro Obat Tradisional	%	75%	49.896.750	0	49.896.750	0	0	Kabid SDK
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sarana Apotek, toko obat, UMOT yang diterbitkan surat hasil pengawasan (surat peringatan atau surat keterangan memenuhi syarat) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Sarana Apotek, toko obat, UMOT yang dilakukan pengawasan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	%	20%	24.949.500	0	24.949.500	0	0	Subkoordinator Kefarmasian
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	24.949.500	0	24.949.500	0	0	Subkoordinator Kefarmasian

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Pengawasan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Pengawasan dibagi jumlah semua Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	%	50%	24.947.250	0	24.947.250	0	0	Subkoordinator Kefarmasian
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	24.947.250	0	24.947.250	0	0	Subkoordinator Kefarmasian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah UKBM yang aktif melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran UKBM (atau jumlah yang ada saat ini jika jumlah sasaran telah tercukupi) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	%	100%	2.242.328.350	724891500	662436400	738903450	738903450	Kabid Kesmas

	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di suatu wilayah tertentu dikali 100%	%	100%	152.345.000	104814000	32299000	15232000	0	Subkoordin ator Promosi dan Pemberda yaan Masyaraka t
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dok ume n	1	152.345.000	104814000	32299000	15232000	0	Subkoordin ator Promosi dan Pemberday aan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di suatu wilayah tertentu dikali 100%	%	100%	2.089.983.350	620077500	630137400	723671450	116097000	Subkoordin ator Promosi dan Pemberday aan Masyarakat
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dok ume n	16	2.089.983.350	620077500	630137400	723671450	116097000	Subkoordin ator Promosi dan Pemberday aan Masyarakat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap kepuasan pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	175.590.032.086	38572621367	62560858877	37313306871	37143244971	Sekretariat

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tahunan yang disusun sesuai Pedoman dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi tahunan yang harus disusun dikali 100%	Dokumen		110.000.000	110.000.000	0	0	0	Kasubag PEP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	55.000.000	55.000.000	0	0	0	Kasubag PEP
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	55.000.000	55.000.000	0	0	0	Kasubag PEP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	173.049.701.490	37082078871	61803464877	37082078871	37082078871	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1,923	173.049.701.490	37082078871	61803464877	37082078871	37082078871	Kasubbag Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	631.134.496	227364396	209250000	137510000	57010100	Kasubbag Umpeg

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	34.862.240	9940240	9750000	9800000	5372000	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	232.393.156	69385156	81480000	49470000	32058000	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	71.400.000	27000000	27000000	17400000	0	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	88.130.000	19989000	29970000	19790000	18381000	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288	3.850.000	1050000	1050000	1050000	700000	Kasubbag Umpeg
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.499.100	100000000	60000000	40000000	499100	Kasubbag Umpeg
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	310.732.000	0	310.732.000	0	0	Kasubbag Umpeg
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	310.732.000	0	310.732.000	0	0	Kasubbag Umpeg

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap kepuasan pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	954.076.000	731600000	158412000	60857000	3207000	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	381.436.000	244600000	90912000	45557000	367000	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	146.000.000	146.000.000	0	0	0	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	426.640.000	341000000	67500000	15300000	2840000	Kasubbag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor, Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap kepuasan pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017		indeks 3	534.388.100	421578100	79000000	32861000	949000	Kasubbag Umpeg

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	200.000.000	155001000	36500000	8050000	449000	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	219	82.500.000	72000000	8000000	2000000	500000	Kasubbag Umpeg
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	103.311.000	46000000	34500000	22811000	0	Kasubbag Umpeg
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	148.577.100	148.577.100	0	0	0	Kasubbag Umpeg

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Tahun 2023, disusun sebagai perwujudan dan komitmen seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan kinerja instansi dalam mengawal urusan Kesehatan di Pemerintahan serta melaksanakan fungsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen disusun seobyektif mungkin agar dapat mencerminkan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja adalah: Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja; Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam satu tahun.

Demikian Rencana Aksi Dinas Kesehatan Tahun 2023 kami susun, semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Sragen, Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SRAGEN



dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19740409 200312 2 002



**RENCANA AKSI DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN SRAGEN**

TAHUN 2023

